



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AKHMAD MA'MUN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 695322

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.019.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 283 m2/150 m2 di KAB / KOTA BREBES, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 344.000.000
2. Tanah Seluas 179 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 58.000.000
3. Tanah Seluas 852 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
4. Tanah Seluas 1.509 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
5. Tanah Seluas 1.750 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 82.000.000
6. Tanah Seluas 201 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 153.200.000**

1. MOBIL, KIJANG INNOVA MINI BUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 108.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.900.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO SOLO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 16.900.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY MATIC Tahun 2021, HASIL SENDIRI



Rp. 17.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 14.350.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 247.369

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.186.797.369

III. HUTANG

Rp. 243.345.954

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 943.451.415

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.